

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-Kawasan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada dasarnya telah berfungsi sebagai sistem penyedia data kawasan pertanian yang terintegrasi dan mulai dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya di tingkat pusat. Data yang tersedia di dalam sistem sudah mencakup informasi dasar kawasan seperti profil wilayah, luas lahan, produksi, produktivitas, serta rencana pengembangan kawasan. Selain itu, e-Kawasan juga telah dirancang terintegrasi dengan sistem perencanaan lainnya sehingga secara konsep sudah mendukung perencanaan berbasis data.

Namun demikian, dari sisi ketersediaan, kualitas, dan pembaruan data masih ditemukan ketimpangan antar daerah. Daerah yang aktif dan mendapatkan pendampingan dari pusat cenderung memiliki data yang lebih lengkap dan mutakhir, sedangkan daerah yang belum mendapatkan sosialisasi dan pendampingan belum melakukan pembaruan data secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas data dalam e-Kawasan masih sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas masing-masing daerah.

Di sisi lain, pemanfaatan data e-Kawasan di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Pada beberapa daerah, e-Kawasan masih dipahami sebatas aplikasi untuk melakukan input data sebagai kewajiban administratif. Belum terdapat kejelasan tindak lanjut mengenai bagaimana data yang telah diinput tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pertanian di daerah. Hal ini menyebabkan fungsi strategis e-Kawasan sebagai alat perencanaan berbasis data belum dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan utama dalam optimalisasi e-Kawasan bukan terletak pada aspek teknis aplikasi, melainkan pada aspek komunikasi kebijakan, sosialisasi, koordinasi pusat dan daerah, serta belum adanya regulasi yang kuat dan mengikat terkait kewajiban penginputan dan pembaruan data. Tidak adanya aturan yang

tegas menyebabkan tingkat kepatuhan daerah dalam mengelola data menjadi berbeda-beda.

Dengan demikian, optimalisasi data melalui aplikasi e-Kawasan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang efektif, pendampingan teknis yang merata, komitmen pemerintah daerah, serta dukungan regulasi yang jelas agar e-Kawasan benar-benar dapat berfungsi sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan pertanian berbasis data.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, optimalisasi pemanfaatan data melalui aplikasi e-Kawasan masih memerlukan berbagai upaya perbaikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta membuka peluang pengembangan kajian pada penelitian selanjutnya. Bagi Kementerian Pertanian sebagai pengelola utama sistem e-Kawasan di tingkat pusat, diperlukan penguatan kebijakan dan tata kelola yang lebih jelas dan mengikat terkait kewajiban penginputan serta pembaruan data oleh pemerintah daerah. Regulasi yang tegas disertai dengan pedoman teknis yang rinci akan membantu daerah memahami standar pengelolaan data yang diharapkan. Selain itu, Kementerian Pertanian perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan daerah dalam mengisi data, serta memberikan umpan balik terkait kualitas data yang telah diinput. Upaya sosialisasi dan bimbingan teknis juga perlu diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman antar daerah. Penyusunan panduan pemanfaatan data e-Kawasan dalam proses perencanaan daerah juga menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai tindak lanjut setelah proses input data dilakukan. Di samping itu, pengembangan fitur pendukung seperti notifikasi pembaruan data dan penguatan koordinasi antara unit pengelola e-Kawasan dengan unit perencanaan di tingkat pusat akan semakin mendorong integrasi pemanfaatan data dalam proses penganggaran berbasis kawasan.

Bagi pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam mengelola dan memanfaatkan e-Kawasan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai alat bantu utama dalam perencanaan pembangunan pertanian. Pemerintah daerah diharapkan

dapat menjadikan data e-Kawasan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan perencanaan tahunan. Penunjukan petugas atau operator yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pembaruan data secara rutin juga sangat diperlukan agar data yang tersedia selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, koordinasi internal antara bidang teknis, perencanaan, dan pengelola data perlu ditingkatkan agar data yang diinput benar-benar relevan dengan kebutuhan perencanaan. Pembahasan data e-Kawasan juga sebaiknya diintegrasikan dalam forum-forum perencanaan daerah, serta didukung dengan koordinasi lintas OPD seperti dengan Bappeda, sehingga data kawasan dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan tidak terbatas pada satu instansi saja. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis juga menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pengelolaan data.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan lokasi penelitian ke lebih banyak daerah agar diperoleh gambaran implementasi e-Kawasan yang lebih menyeluruh di Indonesia. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan e-Kawasan secara lebih terukur. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji hubungan antara kualitas data dalam e-Kawasan dengan kualitas perencanaan pembangunan pertanian di daerah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan daerah dalam melakukan penginputan data. Kajian dari sisi kebijakan publik terkait peran regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta perbandingan dengan sistem informasi serupa di sektor lain juga dapat menjadi topik yang relevan untuk dikembangkan.